

# Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Kaum Marginal di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pendidikan Komunitas Sekolah Marjinal, DIY)

Dewi Safitri <sup>a,1</sup>, Nasiwan <sup>b,2</sup>

<sup>1</sup> ([dewisafitri.2020@student.uny.ac.id](mailto:dewisafitri.2020@student.uny.ac.id)) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

<sup>2</sup> ([nasiwan@uny.ac.id](mailto:nasiwan@uny.ac.id)) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis peranan Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) dalam pemenuhan hak pendidikan nonformal bagi anak kaum marginal; (2) Mengetahui upaya yang dilakukan komunitas dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak kaum marginal di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) pada Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) yang berlokasi di Kabupaten Sleman, DIY. Subjek penelitian ditetapkan menggunakan teknik *purposive* dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi dengan analisis data model interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Komunitas Sekolah Marjinal mengambil peranan dalam pemenuhan hak pendidikan melalui strategi 4A (*Availability, Accesibility, Acceptability, Adaptability*) berupa penyediaan ruang pembelajaran dan pendidikan gratis melalui 3 sekolah, akomodasi biaya pendidikan bagi anak kaum marginal, *Recruitment* tenaga pendidik yang berperan sebagai guru melalui relawan mengajar, membentuk sistem pembelajaran nonformal yang diintegrasikan melalui kurikulum sesuai kebutuhan siswa, menyusun program khusus (Kelas Inspirasi dan *Outing Class*) untuk mendorong semangat anak kaum marginal, pembelajaran kolaboratif dengan sistem *funlearning*, serta sosialisasi pendidikan untuk menjangkau masyarakat sekitar. (2) Dalam upaya memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak didik, Komunitas Sekolah Marjinal mendirikan sebuah program khusus bernama "Kembali ke Sekolah" untuk mengembalikan anak-anak didik menuju sekolah formal melalui tahapan pembekalan, persiapan administrasi, dan pembiayaan.

## ABSTRACT

*This research aims to: (1) Analyze the role of Marginal School Communities (KSM) in fulfilling the rights to non-formal education for marginalized children; (2) Knowing the efforts made by the community to support the sustainability of education for marginalized children in Sleman Regency. This research uses a qualitative approach with a case study type in Marginal School Communities (KSM) located in Sleman Regency, DIY. Research subjects were determined using purposive techniques by collecting data through observation, interviews and documentation. The data validity test technique uses triangulation with interactive model data analysis, namely data collection, data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the research show that: (1) Marginal School Communities play a role in fulfilling the right to education through the 4A strategy (Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability) in the form of providing free learning and education spaces through 3 schools, accommodation for education costs for marginalized children, recruitment of personnel. educators who act as teachers through volunteer teaching, forming non-formal learning systems that are integrated through the curriculum according to student needs, preparing special programs (Inspiration Classes and Outing Classes) to encourage the enthusiasm of children from marginalized groups, collaborative learning with a fun learning system, as well as educational outreach to reach the community around. (2) In an effort to provide educational opportunities for students, the Marginal School Community established a special program called "Back to School" to return students to formal schools through the stages of provision, administrative preparation and financing.*

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Komunitas Sekolah Marjinal, Hak Pendidikan, Anak Kaum Marginal

Keywords:

Marginal School Communities, Educational Rights, Marginalized

## Pendahuluan

Kemiskinan menjadi alasan utama pembangunan digencarkan, namun kesejahteraan tetap tidak merata hingga ke segala lapisan. *Global Finance Magazine*, sebuah perusahaan penerbitan berita yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbaik dunia merilis artikel terbarunya mengenai data “Negara-Negara Termiskin di Dunia Tahun 2023” dimana Indonesia masuk dalam 100 besar tepatnya pada posisi 92 dari 195 negara di Dunia. Meskipun begitu, dinyatakan bahwa persentase kemiskinan mampu diturunkan oleh para pemegang kebijakan di dalam negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2023 terdapat 9,36 % penduduk miskin di Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan 0,21% dibandingkan bulan September 2022 dan 0,18% dibandingkan bulan Maret 2022. Padahal, posisi tersebut berbanding jauh dengan tingkat kemiskinan pada September 2019 dengan persentase 9,22%. Belum sampai disitu, korelasi antara penurunan tingkat kemiskinan tidak berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan sosial di Indonesia. Dimana tingkat ketimpangan Indonesia diukur melalui Indeks Gini Ratio sebesar 0,388 pada Maret 2023 dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 sebesar 0,3881 atau naik 0,007 poin. Kenaikan tingkat ketimpangan ini mengacu pada pengeluaran masyarakat kota yang cenderung meningkat sedangkan wilayah desa tetap konstan. Jika ketimpangan sosial mengalami kenaikan, artinya terdapat kesenjangan serius di tengah-tengah masyarakat dan itu terjadi di wilayah perkotaan. Jika ketimpangan sosial akibat proses pembangunan terus dibiarkan, maka akan melahirkan marginalisasi masyarakat kota. Marginalisasi merupakan bentuk ketidakseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, politik dan pendidikan di masyarakat (E. M. Sari & Mastanora, 2022)

Rahman dalam artikelnya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keadaan atau ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti air, makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan (Rahman, 2019). Kemiskinan terbagi menjadi dua jenis yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Oscar Lewis menjelaskan bahwa kemiskinan kultural terjadi akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang miskin seperti malas, mudah menyerah, bergantung pada nasib, etos kerja rendah dan lain sebagainya (Ari Mulyani, 2020, hlm.13). Sedangkan Kemiskinan struktural muncul karena terbatasnya akses terhadap sumber daya dalam kerangka sosial, budaya, dan politik. Bahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat membuat kemiskinan menjadi semakin mendalam. Sebagai contoh, masyarakat marginal kerap kali mengalami keterbatasan akses dalam berbagai bidang yang dikelola oleh Pemerintah. Padahal, Pasal 34 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kemiskinan kultural merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang terlalu lama sehingga membentuk masyarakat yang apatis, pasrah, dan berorientasi bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir (Ari Mulyani, 2020).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah dalam artikel yang dimuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut bahwa praktik diskriminasi terhadap kelompok marjinal masih marak terjadi. Setidaknya terdapat 5000 aduan yang diterima oleh Komnas HAM terkait tindakan diskriminasi terhadap kelompok rentan termasuk kelompok marjinal di dalamnya (Latuharhary, 2023). Seluruh kasus tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah masih minim dalam memberdayakan kelompok marginal. Padahal dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat 3 disebutkan bahwa kelompok rentan berhak atas perlindungan, kemudian dirinci kembali dalam Pasal 42. Bentuk perlindungan Pemerintah yang kerap diperbincangkan oleh awak media salah satunya adalah program bantuan kesejahteraan untuk masyarakat. Program ini dapat berupa bantuan sosial secara non tunai, subsidi pemerintah, program keluarga harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (Pendidikan), program jaminan kesehatan, program

Indonesia sehat, simpanan keluarga, dan berbagai pelayanan publik. Namun, pemerintah dirasa belum mampu menyalurkan secara maksimal sehingga berbagai kasus “salah sasaran”

mencuat. Pada pertengahan 2022 lalu, terjadi korupsi bansos oleh Kementerian Sosial RI yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kalangan bawah. Disusul tahun 2023 marak terjadi korupsi dana desa hingga dana bantuan langsung tunai (BLT) oleh beberapa kepala desa di Indonesia. Berdasarkan catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari tahun 2021 hingga 2023, negara mengalami kerugian hingga Rp 513 Miliar perbulannya sebab penyaluran bansos yang salah sasaran (Gandhawangi, 2023). Kasus seperti ini tidak hanya merugikan uang negara juga membuat nasib-nasib masyarakat bawah kian terjun ke dasar jurang. Akibatnya masalah kemiskinan merajalela sehingga masyarakat semakin terpinggirkan dari kesejahteraan terlebih bagi kelompok-kelompok rentan.

Kaum marginal identik dengan masyarakat yang terpinggirkan dengan kehidupan yang kumuh, abai terhadap tata tertib, rentan kemiskinan, sering mendapat diskriminasi bahkan sebagian besar tidak berpendidikan. Sebagai kewajiban pemerintah, dicanangkanlah program wajib belajar 9 tahun yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan fasilitas pendidikan hingga rendahnya kemampuan ekonomi wali murid menyebabkan program pendidikan masih mengalami kesenjangan terutama bagi anak kaum marginal (D. W. Sari & Khoiri, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ari Shandy & Subaidi (2022) ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat marginal tidak mementingkan pendidikan yakni: pertama, mengenai nilai hidup yang belum mereka pahami secara mendalam melalui adanya pendidikan dan kedua, anak-anak yang mengikuti pendidikan tidak dapat menghasilkan uang dengan cepat sebab harus melalui berbagai proses yang cukup lama (hal. 9748-9749). Masyarakat lebih mengedepankan nilai ekonomi untuk terus menyambung hidup. Akibatnya sebagian besar anak-anak kaum marginal cenderung memilih tidak sekolah dan menggunakan waktu belajarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai persentasi penduduk miskin menurut provinsi dan daerah. Mirisnya, Yogyakarta menjadi provinsi termiskin di daerah pulau Jawa dengan persentase kemiskinan sebesar 11,49% atau dapat dikatakan mencapai 463.630 jiwa. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode Maret 2022 sebesar 457.760 jiwa (BPS D.I. Yogyakarta, 2023). Ini menjadi bukti bahwa masalah kemiskinan masih sulit diretas oleh pemerintah daerah. Tak terkecuali beberapa daerah pinggiran di Yogyakarta. Diperkuat kembali dengan tingginya tingkat ketimpangan Provinsi Yogyakarta yang menduduki posisi pertama di Indonesia. Fenomena keberadaan kaum marginal memberi tanda tanya besar kepada pemerintah, ditambah dengan label Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai "Kota Pelajar" namun masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya sebagai warga negara terutama dalam ranah pendidikan. Hingga diselenggarakan berbagai pendidikan alternatif oleh masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, disini pula dapat dibuktikan bahwa lembaga masyarakat mampu mengambil peran dalam menuntaskan kemiskinan melalui pengadaan pendidikan. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal inilah yang diupayakan oleh Komunitas Sekolah Marginal di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Komunitas Sekolah Marginal merupakan komunitas non-profit yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa yang peduli akan pendidikan khususnya pada daerah marginal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Komunitas ini pada mulanya memiliki nama Komunitas Sekolah Pemulung (KSP) dan berdiri pada tahun 2019 dengan kegiatan bermain dan belajar bersama anak-anak pemulung di lapak pemulung kledokan. KSM melebarkan sayapnya melalui kerjasama dengan beberapa komunitas seperti Komunitas Pelajar Peduli. Selain bergerak dalam pendidikan, Komunitas Sekolah Marginal juga

memberikan akses kesehatan dan advokasi identitas bagi kaum marjinal di Provinsi D.I. Yogyakarta (Syukriyah et al., 2021). Pada pertengahan tahun 2022, sekolah pertama KSM yang berada di Lapak

Pemulung, Kledokan mengalami penggusuran sehingga dipindahkan ke Tambak Bayan. Namun kini KSM memiliki tiga tempat dalam menggelar kegiatan pendidikan yakni di Tambak Bayan, Jombor, dan Badran. Dalam melaksanakan programnya, KSM diliputi berbagai masalah terutama masalah penggusuran sekolah di Kledokan sehingga harus berpindah sementara ke kampung Badran. Hal ini disebabkan bahwa Kampung Pemulung yang berada di Kledokan berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten. Upaya negosiasi telah dilakukan namun tak membuahkan hasil sehingga Sekolah Marjinal berakhir di daerah Tambak Bayan, Babarsari, Kabupaten Sleman.

Komunitas Sekolah Marjinal memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan serta membantu memenuhi hak-hak kaum marginal yang belum terpenuhi, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan advokasi (Ramadani, 2018). Proses *engagement* KSM dengan Warga Perkampungan Pemulung dapat dikatakan cukup baik yang dibuktikan dengan keberlanjutan komunitas hingga detik ini melalui tiga tahapan yakni *receptivity, expectancy, investasi, dan relationship* (Nurdiani, 2021). Salah satu program dari Komunitas Sekolah Marjinal adalah mengadakan pelayanan pendidikan berupa pengajaran dan pembangunan sekolah. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peranan Komunitas Sekolah Marjinal Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-anak Marginal di Yogyakarta. Diharapkan penelitian ini nantinya memberikan kajian lebih dalam khususnya dalam studi Hak Asasi Manusia yang berfokus pada hak-hak warga negara berupa pendidikan (*education for all*). Komunitas merupakan sebuah perkumpulan yang bergerak di sebuah populasi tertentu dalam wilayah yang sempit. Pada dasarnya komunitas memiliki posisi sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan komunitas dalam melayani masyarakat, mampu menjadi sumber evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan serta kebijakan di berbagai daerah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) pada Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) yang berlokasi di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta sebagai respon atas fenomena keberadaan kaum marginal yang berkelompok di suatu wilayah. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Maret 2024 hingga Mei 2024. Subjek penelitian ditetapkan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan kriteria tertentu yang terdiri dari Ketua KSM periode 2023-2024 sebagai informan kunci, 2 Kepala Departemen (pengurus) dan 3 Relawan Mengajar sebagai informan utama, orang tua serta anak didik di KSM. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi data dengan membandingkan sumber data satu dengan lainnya. Teknik analisis data mengambil model interaktif yang memiliki 4 sekuen yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Peranan Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Nonformal Bagi Anak Kaum Marginal di Kabupaten Sleman

Dalam memecahkan problematika pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menerapkan model pendidikan "*education for all*" yang berarti pendidikan harus dijangkau oleh semua orang tanpa memandang status atau latar belakang seseorang demi tercapainya pemerataan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyebutkan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-

luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Sejalan dengan tujuan utama Komunitas Sekolah Marjinal yakni

pemerataan pendidikan dengan kebebasan pengembangan diri anak-anak tanpa terhalang apapun. Oleh karenanya, berbagai upaya dilakukan komunitas, diawali dengan pembentukan komunitas serta regulasi sebagai pondasi perluasan ruang gerak komunitas. Mulai dari pembangunan sekolah, *open recruitmen* pengurus, relawan, dan kakak asuh, kolaborasi, menjanging mitra kerja, hingga mengatur pendanaan yang berasal dari donator dan mandiri. Kedudukan KSM semakin signifikan semenjak warga kampung pemulung menerima dengan terbuka sebab kegiatan-kegiatan KSM yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar seperti kegiatan syukuran dengan membagikan hadiah, adanya majelis ta'lim, cek kesehatan gratis, hingga upaya advokasi administrasi penduduk setempat. Hal ini juga termasuk dalam upaya pendekatan yang dilakukan KSM untuk membuka kesadaran kritis warga sekitar. Secara sederhana konsep ini telah dikemukakan oleh Freire dimana kesadaran adalah kunci utama dalam pendidikan untuk pembebasan. Maka untuk membuka kesadaran tersebut diperlukan metode pendidikan yang diselaraskan dengan realitas masyarakat (Husni, 2020). Perlu diketahui bahwa seluruh pendidikan yang diberikan oleh KSM adalah pendidikan nonformal atau pendidikan diluar sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang bebas pada anak-anak dalam menentukan masa depannya tanpa rasa takut dan terkekang. Maka dari itu, kegiatan yang diadakan tidak seperti sekolah formal, meskipun sama-sama menggunakan pedoman Kurikulum atau RPP dalam penyelenggarannya. Freire dalam bukunya "Pendidikan yang Membebaskan" yang dikutip oleh Situmorang (2021) berpendapat bahwa pendidikan formal kerap kali menerapkan sistem pendidikan gaya bank dimana guru sebagai penabung (subjek) dan siswa sebagai tabungan (objek) (hal. 152). Melihat dampak yang begitu signifikan, Komunitas Sekolah Marjinal telah menjalankan peranan penting dalam upaya meratakan pendidikan kepada seluruh anak kaum marginal. Adapun strategi-strategi yang digunakan yakni sebagai berikut.

a. Penyediaan Ruang Belajar Anak-Anak Didik

Dalam upaya membantu pemenuhan hak pendidikan anak-anak kaum marginal, hal yang pertama kali dilakukan KSM adalah membangun sekolah sebagai ruang belajar anak-anak. Sekolah dalam hal ini merujuk pada pusat pembelajaran atau pusat pendidikan tidak seperti gedung besar yang dilengkapi berbagai sarana. Penyediaan ruang belajar sesuai dengan indikator pertama yakni pendidikan tersedia (*availability*). Sesuai dengan pengamatan peneliti, penyelenggaraan pendidikan oleh KSM terpusat pada beberapa sekolah yang tersebar di 3 wilayah berbeda yakni Sekolah Marjinal, Sekolah Harapan, dan Sekolah Cinde. Sekolah Marjinal sendiri pertama kali dibangun di daerah Kledokan, Caturtunggal tepatnya di Perkampungan Lapak Pemulung. Namun, karena terdapat permasalahan antara masyarakat dan pemerintah setempat, maka Sekolah Marjinal berpindah ke daerah Tambakbayan, Babarsari, Sleman. Pada pengamatan pertama, pembelajaran Sekolah Marjinal dilakukan di balai padukuhan tambak bayan. Pihak KSM telah bekerja sama dengan Ketua RW untuk memakai ruang tersebut. Jika balai padukuhan sedang memiliki kegiatan maka Sekolah Marjinal dilaksanakan di halaman teras gedung SD Al-Islam Tambak Bayan. Dengan kata lain, pembelajaran di Sekolah Marjinal berpindah-pindah, menyesuaikan situasi dan kondisi ketika pembelajaran akan dilakukan. Selain itu, pembelajaran sambil bermain juga dilaksanakan di area SD Al-Islam, sebab memerlukan tanah lapangan agar lebih kondusif. Biasanya pembelajaran diikuti lebih dari 10 anak, terbukti pada saat pengamatan dilakukan terdapat 12 anak yang hadir dalam kegiatan belajar mengajar.

Sekolah yang kedua yakni Sekolah Harapan, dimana sekolah ini terletak di daerah Trini, Sleman Yogyakarta. Khusus untuk sekolah harapan, Sebagian besar siswanya berasal dari anak-anak buruh dan pekerja ART dengan ekonomi menengah ke bawah. Sekolah Harapan telah

memiliki tempat permanen sebab bangunan tersebut tidak terpakai sehingga dialihfungsikan sebagai ruang belajar anak-anak. Pada saat observasi, ditemukan sebuah ruangan yang menjadi gudang penyimpanan sarana dan prasarana pembelajaran yang diadakan oleh KSM.

Dan terakhir, sekolah ketiga merupakan sekolah yang baru diresmikan pada bulan Januari 2024 dengan lokasi di Lempongsari Sleman. Mengambil nama “Sekolah Cinde” yang diangkat dari motif “cinde” memberikan arti bahwa setiap manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah cinde dilakukan di halaman teras rumah warga yang dirasa luas. Meskipun begitu, antusias anak-anak cukup tinggi terbukti bahwa pembelajaran selalu dihadiri lebih dari 10 anak-anak. Data terbaru menunjukkan perbandingan jumlah sebenarnya antara pengurus, relawan, dan anak-anak ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1  
Perbandingan Jumlah Pengurus, Relawan, dan Anak-Anak KSM

NAMA	JUMLAH	
Pengurus:	80	
Relawan:	88	
Jumlah Anak didik:	1. Sekolah Marjinal:	20
	2. Sekolah Harapan:	17
	3. Sekolah Cinde:	17

b. Akomodasi Biaya Pendidikan

Proses penyediaan ruang belajar tidak dapat berjalan tanpa adanya pembiayaan. Tersedianya sistem anggaran pendidikan memenuhi tolak ukur ketersediaan (availability). Pada awal berdirinya, sumber anggaran sekolah berasal dari penyebaran proposal donator kepada berbagai pihak demi membangun ruang kelas semi permanen (Syukriyah, L., et.al., 2021, pp. 7-8). Beberapa bulan berjalan, KSM mulai membuka usaha mandiri diantara Intrash, Bawera Publisher, dan Preloveme. Dengan adanya usaha mandiri, donasi uang tidak lagi diterima namun apabila akan berdonasi barang berupa buku dan lain-lain akan tetap diterima. Pada masa pandemi, KSM melakukan kolaboratif dengan KPP dan Lembaga Zakat (LAZIS AL Haromain cabang Yogyakarta) dalam kegiatan bakti sosial yang berdampak pada warga kampung pemulung. Hingga akhirnya KSM terus membuka kegiatan kolaboratif untuk kegiatan pendidikan, donator, dan kakak asuh anak-anak. Hingga saat ini, pembiayaan KSM berasal penuh dari donator dan kakak asuh setiap anak. Selama mengikuti pendidikan di KSM, anak-anak didik dan orang tua tidak diperkenankan untuk mengeluarkan sejumlah iuran kepada Komunitas dalam bentuk apapun. Sehingga model pendidikan luar sekolah dilaksanakan secara gratis untuk. Pendidikan gratis diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak-anak kaum marginal, mengingat kondisi perekonomian keluarga mereka. Sistem pendidikan gratis memenuhi tolak ukur pendidikan dapat diakses (*Accessibility*) dimana biaya pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang (akseibilitas ekonomi).

c. *Recruitment* Tenaga Pendidik Melalui Relawan Mengajar

Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) menyusun sistem pengadaan tenaga pendidik melalui *open recruitmen* relawan mengajar. Adapun tahapan open recruitmen antara lain *open recruitmen*, interview, pengumuman, pembekalan umum, dan pembekalan khusus. Dalam studi *civic education*, adanya relawan mengajar untuk anak-anak kaum marginal melalui KSM sangat berkaitan dengan *civic participation*. Partisipasi relawan berasal dari rasa kesadaran akan kepedulian masa depan anak-anak melalui pendidikan. Oleh karena itu, relawan mengambil peran penuh dalam berbagai bentuk partisipasi (uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan). Relawan mengajar memiliki posisi strategis dalam pemenuhan hak pendidikan sebab

merekalah yang akan berinteraksi langsung kepada anak-anak. Oleh karena itu, terdapat agenda *gathering* sebagai bentuk pembekalan relawan mengajar sebelum terjun mengajar.

Sehingga, para relawan memiliki kualitas yang baik dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Meskipun relawan mengajar tidak seperti guru di sekolah formal, tetapi KSM terus mengusahakan peranan relawan seperti guru sekaligus mentor bagi anak-anak. Pembekalan dilakukan secara keseluruhan antara pengurus dan relawan di tempat yang sudah ditentukan. Sistem pembekalan biasanya akan mengundang beberapa tokoh dari luar sesuai tema *gathering* untuk memberi materi, kemudian materi dari pengurus seputar pemahaman KSM lebih dalam serta materi dari divisi kurikulum berupa sistem pendidikan yang diadakan oleh KSM. Agenda *gathering* mengambil satu hari penuh dalam rangkaian kegiatannya. Mulai dari sesi materi, diskusi, diskusi grub, dan pelatihan secara sederhana.

Relawan sebagai pendidik memiliki posisi sangat penting dalam upaya menyelenggarakan pendidikan. Bahkan untuk memberikan keefektifan penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak, maka tanggung jawab antara pengurus dan relawan dibedakan serta setiap orang tidak boleh memiliki *double role* (peran ganda). Selain relawan mengajar, KSM juga menyediakan “Kakak asuh” untuk setiap anak melalui *recruitmen*. Namun, dalam beberapa kesempatan seorang relawan boleh menjadi kakak asuh bagi anak-anak sehingga memiliki peran ganda sebab tugas relawan dan kakak asuh masih saling berkaitan. Kakak asuh memiliki peran untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di situasi jalanan atau prasejahtera.

d. Pembentukan Sistem Pembelajaran Nonformal

Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) menerapkan sistem pendidikan non-formal yang telah disusun secara runtut dan berkesinambungan dengan struktur penanggung jawab setiap sekolah. Dalam setiap sekolah terdapat Kepala Sekolah dan Wakil Kesiswaan yang diambil dari pengurus divisi kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak bersekolah sesuai lokasi dan keterbutuhannya. Sistem pembelajaran nonformal dirasa sangat sesuai dengan kondisi anak-anak kaum marginal yang kesulitan menempuh pendidikan formal namun memiliki semangat untuk belajar. Sejalan dengan indikator pendidikan harus dapat diterima (*acceptability*) dimulai dari kurikulum, bentuk dan isi pendidikan, dan metode mengajar sesuai dengan budaya siswa. Oleh karena itu, Kepala Sekolah dan Wakil Kesiswaan bertugas melihat evaluasi perkembangan anak-anak didik sebagai bahan pertimbangan isi dan bentuk materi ajar. Pemberian materi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak dan melihat perkembangan pengetahuan anak-anak (khusus yang sudah sekolah).

Pengamatan pada instrumen pembelajaran anak-anak, ditemukan adanya perbedaan tingkatan tugas siswa menjadi 3 tingkat. Setiap tingkatan memiliki level kesulitan yang berbeda, sehingga dalam pembelajaran, anak-anak akan dibagi sesuai dengan tingkatannya tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengacu pada Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh pengurus divisi kurikulum. RPP disusun lebih fleksibel dibandingkan RPP Sekolah Formal dimana hanya dimasukkan bagian-bagian penting seperti tema materi, topik pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran.

Pada praktiknya, pembelajaran akan dipegang oleh penanggungjawab yang disebut *Leader Harian*. *Leader Harian* akan membuka pembelajaran, memegang penuh jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM), memimpin evaluasi relawan setelah mengajar, serta

bertanggung jawab atas kehadiran relawan pada hari itu. Adapun beberapa keterampilan yang diberikan oleh KSM yakni keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung

(Calistung), menggambar, melukis, mewarnai, mengaji, menanam, memasak, kriya, dan daur ulang. Dengan sistem pembelajaran luar sekolah (Pendidikan Nonformal), pengurus berusaha untuk merumuskan RPP sesuai dengan kebutuhan anak-anak tidak terpaku pada mata pelajaran formal dengan materi yang kaku. Sebagai contoh pada pengamatan, anak-anak diberikan pembelajaran mengenai pertumbuhan hewan dan tumbuhan dengan kegiatan game menyusun proses pertumbuhan secara berkelompok. Di sela-sela pembelajaran mereka menyanyikan lagu "Biji Ditanam". Maka disimpulkan bahwa pembelajaran disusun agar anak-anak nyaman dalam pembelajaran dan tidak bosan. Di sisi lain, relawan telah menjalankan peran guru untuk mendidik, mengajar membimbing, dan mengarahkan. Tugas untuk anak-anak biasanya diberikan dalam bentuk worksheet. Worksheet diturunkan dari materi RPP serta pengerjaannya akan dipandu oleh relawan mengajar. Sedangkan dalam hal evaluasi, biasanya di akhir pembelajaran diadakan refleksi. Komunitas Sekolah Marjinal memiliki metode unik dalam pengajaran yakni pembelajaran melingkar agar tidak ada kesenjangan antara relawan dan anak-anak didik. Anak-anak didik diposisikan sebagai subjek bukan objek yang selalu diberikan materi yang kaku, sehingga dialog antara relawan dan anak-anak terjadi secara interaktif. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak bebas berpendapat sesuai pikiran mereka tanpa tertekan. Apapun pendapat anak-anak diterima oleh para relawan sebab tolak ukur aktif dalam pembelajaran adalah berani berbicara apapun itu dan akrab dengan para relawan dengan mampu mengingat nama-nama dari relawan. Secara tidak langsung, penerapan ini berkaitan dengan pendidikan alternatif yang dikemukakan oleh Freire dimana peserta didik dan guru harus diposisikan sebagai subjek agar tercipta sebuah dialog. Dialog merupakan kreasi dan tidak boleh digunakan untuk mendominasi orang lain (Freire, 2020). Pembelajaran dilaksanakan tanpa diskriminasi, tidak ada syarat tertentu bagi anak-anak untuk mengikuti seluruh kegiatan dari KSM. Pengurus dan relawan tidak boleh membedakan setiap anak dalam proses mengembangkan potensinya. Semua anak-anak memiliki hak secara utuh untuk berkembang tanpa diskriminasi. Sistem pendidikan tanpa diskriminasi ini telah sejalan dengan indikator pendidikan dapat diakses (*accessibility*).

e. Program Kelas Inspirasi dan *Outing Class*

Melalui seluruh pengurus, relawan mengajar, dan kakak asuh oleh KSM, anak-anak selalu diberikan motivasi, dukungan dan dorongan untuk semangat menempuh pendidikan. Terdapat program khusus untuk memberikan motivasi pada anak-anak yakni program kelas inspirasi dan *outing class*. Pada tahun 2024, KSM menyelenggarakan kelas inspirasi dengan tema "Mengenal Profesi Memasak & Cooking Class" tepatnya tanggal 16 dan 25 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak mengenai bidang *food and beverages*. Diharapkan nantinya anak-anak memiliki pandangan baru mengenai profesi yang berhubungan dengan *skill* memasak dan makanan sehingga meningkatkan motivasi untuk terus belajar mengejar cita-cita.

Sedangkan *outing class* dilaksanakan terakhir pada batch 11 dengan mengangkat tema "Keliling Gedung Oval & Membuat Kerajinan Gerabah" yang dilaksanakan di Taman Pintar, 16 Desember 2023. Pembelajaran luar ruangan dimaksudkan agar anak-anak dapat melihat dunia luar lebih luas dan memberikan semangat untuk bermimpi lebih jauh. Selain itu motivasi, support, dan dorongan juga terus diberikan setiap hari dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan *outing class* dan kelas inspirasi berusaha mengenalkan anak-anak didik kepada dunia luar agar mereka dapat berinteraksi seperti masyarakat pada umumnya. Strategi ini sejalan dengan indikator kesesuaian (*Adaptability*) dimana pendidikan harus mampu memberikan respon atas

kebutuhan siswa tanpa terbatas oleh latar belakang, dtatus dan budaya siswa. Anak-anak kaum marginal memiliki hak yang sama untuk berinteraksi tanpa terancam dikucilkan. Dengan

jalan ini, pendidikan akan membuat mereka sadar bahwa mereka memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya, untuk bebas berkembang, bermain, dan belajar.

f. Pembelajaran Kolaborasi (*Fun Learning*)

Pendidikan harus fleksibel, sebagaimana tolak ukur indikator adaptability. Bentuk kegiatan pendidikan ini ternyata telah diterapkan oleh Komunitas Sekolah Marjinal melalui pembelajaran kolaborasi. Meskipun berbentuk kolaborasi namun tujuan utamanya adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan demi perkembangan potensi anak-anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Agenda di dalamnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh relawan KSM bersama dengan pihak kolaboratif. Sebagai contoh kegiatan kolaboratif antara Komunitas Sekolah Marjinal Universitas Sains Islam Malaysia pada 6 Maret 2024 lalu. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni menggambar, mengaji, games, dan belajar seni (Fahriza, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kolaborasi harus dilakukan dengan sistem *funlearning*, meskipun penerapannya berdasarkan pada rencana kegiatan yang diinisiasi oleh pihak kolaborator. Sebelum pelaksanaan kegiatan pihak KSM dan Kolaborator akan berdiskusi mengenai urgensi pembelajaran tersebut, apakah sesuai dengan tingkatan, pemahaman, dan kebutuhan mereka. Adapun beberapa agenda kolaboratif dan mitra kerja KSM sebagai berikut.

Tabel 2  
Kolaborasi Komunitas Sekolah Marjinal Dengan Pihak Luar

Tgl/Bln /Thn	Jenis Kegiatan	Agenda
06/03/2024	Kolaborasi (KSM x Universitas Sains Islam Malaysia)	Kegiatan sportday dalam bentuk belajar seni, menggambar, mengaji, dan games. Permainan rebut gula-gula hingga bola beracun diadakan secara seru dan menyenangkan
07/03/2024	Kolaborasi (KSM x Duta Baca Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)	Peningkatan minat baca dan literasi adik-adik KSM. Kegiatan diawali dengan penampilan boneka tangan dan menebak teka-teki Binatang. Selanjutnya diberikan buku satu persatu.
19/03/2024	Kolaborasi (KSM x Plantagama Fakultas Pertanian UGM)	Edukasi penanaman tanaman hias dengan kegiatan memanfaatkan barang bekas pakai menjadi tempat tanaman serta membuat cap tangan di kain menggunakan media air.

Sistem pembelajaran kolaborasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa terutama pengenalan dan interaksi kepada dunia luar. Aspek pemenuhan kebutuhan ini telah sesuai dengan indikator *adaptability* dimana pendidikan harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan anak-anak marginal.

g. Sosialisasi Pendidikan

Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap kepada target dan sasaran KSM terutama warga sekitar. Dengan teknik komunikasi terarah, secara perlahan-lahan pengurus membuka pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Sosialisasi pendidikan diadakan secara bertahap melalui rembuk warga, kegiatan-kegiatan rutin desa, dan interaksi antara relawan dengan anak-anak didik ketika mengajak untuk ke sekolah. Terlihat pada observasi di setiap

sekolah, beberapa relawan berinteraksi dengan warga sekitar untuk sekedar bertanya kondisi saat ini sekaligus mengajak anak-anak untuk belajar ke sekolah.

Adapun dalam beberapa kegiatan, KSM kerap melibatkan warga sekitar untuk berpartisipasi dalam Komunitas Sekolah Marjinal, contohnya ketika pembukaan Sekolah Cinde pada Januari 2024 dilaksanakan secara seremonial serta diadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Warga sangat antusias menerima beberapa pelayanan kesehatan seperti cek gula darah dan tekanan darah serta pengarahan cara menjaga kesehataran terutama untuk masyarakat lansia. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa KSM benar-benar memiliki niat serius dalam memberdayakan kaum marginal, mengingat hambatan tersulit penyelenggaraan pendidikan terdapat pada pola pikir warga yang belum cukup terbuka.

Dengan adanya sosialisasi pendidikan, kebutuhan masyarakat baik dalam hal pendidikan maupun bidang lainnya dapat menjadi masukan bagi KSM dalam merencanakan program kegiatan selanjutnya. Pada setiap 3 bulan sekali, dilaksanakan pembagian rapot hasil assesment anak-anak didik. Dimana dalam agenda ini biasanya bersamaan dengan diskusi kepada orangtua wali si anak. Kegiatan ini tentunya dimanfaatkan oleh pengurus untuk mengkomunikasikan perkembangan anak sekaligus melihat problem yang ada di masyarakat. Jika masyarakat resah sebab kurangnya fasilitas kesehatan, maka hal ini menjadi evaluasi bagi KSM agar dapat mengakomodasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal yang diadakan oleh KSM tidak hanya melingkupi proses pembelajaran saja tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan sosial (*Adaptability*)

## 2. Upaya Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) Dalam Mendukung Keberlanjutan Pendidikan Anak Kaum Marginal

Komunitas Sekolah Marjinal tidak hanya memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak marginal melalui pendidikan nonformal dari ketiga sekolah yang telah dibangun, tetapi jika anak-anak sudah memasuki usia sekolah atau memiliki keinginan kembali ke sekolah formal atau mungkin memiliki keputusan yang matang untuk langsung mengasah keterampilan, maka KSM memfasilitasi seluruhnya. Sejalan dengan misi utama KSM yakni memberikan harapan hidup yang layak kepada anak yang seharusnya memiliki harapan. Upaya KSM dibuktikan melalui sebuah program khusus bernama “Program Kembali ke Sekolah”. Program kembali ke sekolah merupakan salah satu program kerja utama KSM yang diupayakan sejak awal berdirinya. Program ini bertujuan untuk mengembalikan anak-anak kembali ke sekolah formal sesuai dengan kemampuan dan jenjang usianya.

Paulo Freire menjelaskan bahwa ontologi harapan berkaitan dengan keinginan manusia untuk terus hidup mempertahankan eksistensinya. Harapan menjadi rekognisi mengenai masa depan yang belum diketahui (Freire, 2020). Dengan kata lain, KSM berusaha menanamkan kesadaran kepada anak-anak kaum marginal bahwa masa depan mereka sangat mungkin bisa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, konsep harapan ini diberikan KSM melalui upaya awal yakni melaksanakan program pengembalian identitas keluarga dan anak-anak sebagai syarat utama dalam menempuh pendidikan formal (advokasi).

Relevan dengan Undang Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dimana identitas disini salah satunya adalah akta kelahiran. Dari latar belakang manapun anak berasal, negara memiliki kewajiban memenuhi hak identitas tersebut. Melalui administrasi ini, anak-anak dapat mendaftar sekolah formal dan diberikan pendidikan yang layak. Beberapa anak yang telah diusahakan menempuh pendidikan formal dan informal antara lain sebagai berikut.

Tabel 3

Daftar Anak-Anak Kembali Ke Sekolah

No.	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan
-----	------	------	--------------------

			/Sekolah Tujuan
1.	Safitri Oktaviana	10	SDN Kledokan
2.	Mia Marshela	7	TK Putra Harapan
3	Intan	-	PKBM Reksonegaraan

Sistem sekolah kejar paket bertujuan untuk menyetarakan pendidikan sesuai dengan jenjang dan kemampuan seseorang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang dituju oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebelum masuk ke sekolah formal, anak-anak biasanya akan mendapat modal pembelajaran selama beberapa bulan. Kemudian, dari pihak pengurus dan relawan mengkonfirmasi lebih lanjut bagaimana keinginan mutlak si anak. Sejalan dengan misi utama KSM yakni memberikan akses bantuan pendidikan pendidikan demi mengurangi angka putus sekolah bagi anak-anak. Sehingga KSM mampu menjamin terpenuhinya akses pendidikan hingga dirinya dewasa nanti.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1) Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) telah melaksanakan strategi 4A (*Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability*) dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi : penyediaan ruang belajar anak-anak melalui 3 sekolah yakni Sekolah Harapan, Sekolah Marjinal, dan Sekolah Cinde, dilengkapi saran pembelajaran berupa buku, papan tulis, dan perangkat pembelajaran pendukung lainnya. Bantuan biaya pendidikan yang diakomodasi oleh KSM melalui sistem donator dan kakak asuh. Pengadaan relawan mengajar sebagai guru sekaligus mentor bagi anak-anak marginal. Penyusunan kurikulum terarah dan berkesinambungan dengan metode pengajaran interaktif dengan mengutamakan dialog antara anak-anak dan relawan dalam sebuah permasalahan. Pemberian motivasi, dorongan serta support untuk terus semangat bersekolah melalui kegiatan kelas inspirasi dan *outing class*. Pengadaan sosialisasi pendidikan oleh KSM melalui pendekatan langsung kepada warga setempat melalui kegiatan rutin maupun insidental. Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) secara sederhana telah memenuhi indikator pemenuhan hak atas pendidikan yang seharusnya disediakan oleh negara. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan memerlukan peran serta masyarakat agar akses pendidikan menjangkau anak-anak yang termajinalkan. 2) Dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak marjinal, Komunitas Sekolah Marjinal (KSM) memberi kesempatan kepada anak-anak yang tidak dapat sekolah untuk kembali kepada tingkatan kelasnya melalui beberapa tahap yakni pembekalan, persiapan administrasi, dan pembiayaan dalam program khusus “Kembali ke Sekolah”. Artinya KSM mampu meningkatkan akses pendidikan yang layak kepada anak-anak marjinal agar diakui secara resmi dan secara berkelanjutan akan terjangkau fasilitas pendidikan sebagaimana hak mereka sebagai warga negara. Dengan begitu, motivasi dan peluang menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi jauh lebih besar. Seluruh proses penyusunan penelitian ini, kata sempurna sangat tidak tidak cocok bertanggung sebab banyaknya kekurangan dalam setiap bagiannya. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi topik yang berbeda seperti bidang kesehatan dan advokasi. Khusus untuk studi *civic education* maka dapat mengambil topik *civic participation* sebagai relawan, dan pembentukan kurikulum dalam pembelajaran Pancasila yang dilakukan KSM. Adapun penelitian ini penuh dengan kekurangan maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjadi penyempurna teori atau hasil data yang telah ditemukan.

## Referensi

- Ari Mulyani, P. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Kultural Dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.47532/jis.v3i1.2>
- Ari Shandy, H. D., & S. Ag, S. (2022). Kajian Sosiologi Tingkat Kesadaran Pendidikan pada Masyarakat Kampung Pemulung Kledokan Yogyakarta. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3147>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2023, January 16). *Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2022*. <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1351/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2022.html>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- Fahriza, F. (2024, March 6). *Kolaborasi dengan Universitas Sains Islam Malaysia, Komunitas Sekolah Marjinal Ajari Anak-Anak Jalanan di Jogja*. Jawa Pos : Radar Jogja.
- Freire, P. (2020). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Penerbit Narasi.
- Husni, M. (2020). Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire “Pendidikan Kaum Tertindas” Kebebasan Dalam Berfikir. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 5, 41–60. <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103>
- Nurdiani, I. R. (2021). *Engagement Komunitas Sekolah Marjinal di Perkampungan Pemulung, Kledokan, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta* [Thesis (Skripsi), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46655>
- Rahman, R. (2019). Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *SOSIORELIGIUS: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1).
- Ramadani, F. A. (2018). PENDIDIKAN ANAK JALANAN OLEH KOMUNITAS SEKOLAH MARJINAL (KSM) KLEDOKAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. In *Isema* (Vol. 3).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. (2003). Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia. (2005). Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- Republik Indonesia. (2014). Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441–9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Sari, E. M., & Mastanora, R. (2022). Solutions for Preventing Media Exposure to Vulnerable Groups and Marginalized Groups on Social Media. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender ...*, 4(2).
- Situmorang, A. (2021). Pendidikan “Kaum Tertindas” Paulo Freire - Suatu Tinjauan terhadap Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Kristen di Indonesia. *Jurnal Arrabona*, 3(2), 152–162. <https://doi.org/10.57058/juar.v3i2.42>
- Syukriyah, L., Wisanggeni, B., Aunillah, F. D. P., Huda, N. F., Shalahuddin, M., Afrizqi, M. W., Karlina, F. H., Utami, R., & Vee. (2021). *Sekolah Marjinal : Kisah & Asa* (A. Paramasatya & N. D. Agestia, Eds.). Pustaka Elagiter.